

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bohari. (2006). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Brotodihardjo, R Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuller, Lon L. (1971). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Hofir, Abdul, Dhimas Wisnu Mahendra, Dwi Ratih Mutiarasari, Edmalia Rohmani, Endang Unandar, Fri Okta Fenni, Gitarani Prastuti, Herry Prpto, I Gusti Agung Yuliari, Indah Fitriana Astuti, Meirna Dianingtyas, Moh Makhfal Nasirudin, Netadea Aprina, Riza Almanfaluthi, Shinta Amalia, Sri Lestari Pujiastuti, Suyani dan Tedy Iswahyudi. (2021). *Cerita di Balik Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Komariah, Rukiah dan Ali Purwito. (2006). *Pengadilan Pajak: Proses Banding Sengketa pajak, Pabean*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1976). *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional; Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Prastowo, Yustinus. (2017). *Pengampu[n]an Pajak*. Jakarta: PT Cita Riset Fiskal.
- Prasetyo, Adinur. (2016). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pudyatmoko, Y. Sri. (2007). *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwati, Ani. (2007). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Rahayu, Ani Sri. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Reed, O. Lee et all. (2002). *The Legal and Regulatory Environment of Business*. United States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saidi, Muhammad Djafar. (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, Jonker. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Pajak*. Jakarta: Ref Publisher.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan 1: Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sutedi, Adrian. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsah, H.T.N. (2009). *Penerapan Good Corporate Governance dalam Bidang Perpajakan, Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara melalui Pajak*. Bogor: Unida Press.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

B. Media Massa atau Lainnya

Bahan kuliah “Teori Hukum” Dr. Patrice Mantiri Rondonuwu. Program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan. 2020.

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. *Jurnal Gema Keadilan: volume 7 edisi 1*. 2020.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Jurnal Crepindo: volume 01 nomor 01*. 2019.

Kristianto, Djoko. *Jurnal Wacana Hukum: volume VIII nomor 2*. 2009.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

OECD. (2015). *Update on Voluntary Disclosure Programmes: A pathway to tax compliance*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/PUU-XIV/2016 yang diucapkan tanggal 14 Desember 2016

C. Website

Achmad Dwi Afriyadi. Fakta 7 'Sultan' di Tax Amnesty Jilid II. Diakses dari www.finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6098475/fakta-7-sultan-di-tax-amnesty-jilid-ii pada tanggal 27 Mei 2022

Amnesti Pajak. Diakses dari www.pajak.go.id/id/amnesti-pajak-10 pada tanggal 17 April 2022

Cara mudah Ikut PPS 2022. Diakses dari www.pajak.go.id/PPS pada tanggal 13 April 2022

Deadline 30 Juni 2022, Peserta Tax Amnesty Jilid 2 Kumpulkan PPh Rp10,01 Triliun per 25 Mei 2022. Ni Luh Anggela. Diakses dari www.ekonomi.bisnis.com/read/20220525/259/1536749/deadline-30-juni-2022-peserta-tax-amnesty-jilid-2-kumpulkan-pph-rp1001-triliun-per-25-mei-2022 pada tanggal 25 Mei 2022

Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung. (2021). Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia. Diakses dari www.advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/ pada tanggal 17 April 2022

Dian Kurniati. *Tersisa Sebulan Lagi, KSP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PPS*. Diakses dari www.news.ddtc.co.id/39370 pada tanggal 25 Mei 2022

Endra Wijaya Pinatih dan Fuad Wahyudi Anthonie. *PPS Bukan Tax Amnesty Jilid 2*. Diakses dari www.pajak.go.id/artikel/pps-bukan-tax-amnesty-jilid-2 pada tanggal 20 Mei 2022

Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2015-2021. Diakses dari www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik pada tanggal 17 Mei 2022

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2021. Diakses dari www.pajak.go.id/sites/default/files/2022-03/Laporan%20Kinerja%20DJP%20Tahun%202021.pdf pada tanggal 28 Mei 2022

PAS FINAL Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final. Diakses dari www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-12/PASFINAL-Presentasi%20Eksternal-PJ091PPhS009201700.pdf pada tanggal 13 April 2022

Sasaran dan Rencana Strategis 2020-2024 Direktorat Jenderal Pajak. Diakses dari www.pajak.go.id/rencana-strategis-2020-2024-direktorat-jenderal-pajak pada tanggal 25 Mei 2022

www.dpr.go.id/jdih/uu1945 diakses pada tanggal 29 April 2022

www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/offshore-voluntary-disclosure-program diakses pada tanggal 27 Mei 2022

www.kbbi.web.id/amnesti diakses pada tanggal 23 April 2022

www.oxforddictionaries.com diakses pada tanggal 23 April 2022

www.youtube.com/watch?v=fMOXdm17vRg [VIDEO NEWS] - Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan: Kebijakan Tax Amnesty Tahun 2016. Diunduh pada tanggal 16 September 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

-----, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

-----, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

-----, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak

-----, Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa